

Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Rahmiati¹, Rahmad Sujud Hidayat², Sendi Sanjaya³, Fikri Latukau⁴, Gandung Sulistyو Nugroho⁵

Universitas Tangerang Raya, Tangerang, Indonesia

Sejarah Artikel:

Diterima **Oktober 2024**

Disetujui **Oktober 2024**

Dipublikasi **November 2024**

Kata Kunci:

Efektivitas; Restorative Justice;
Pidana; Anak

Abstrak: Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan upaya untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji data hukum primer dan sekunder, serta wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memiliki dampak positif dalam mengurangi dampak buruk proses peradilan terhadap anak, seperti stigmatisasi dan hambatan reintegrasi sosial. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya fasilitas pendukung, serta keterlibatan masyarakat yang masih rendah. Untuk meningkatkan implementasi restorative justice, diperlukan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, penguatan peran lembaga masyarakat, serta sosialisasi kepada korban dan masyarakat terkait manfaat pendekatan ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Abstract: The restorative justice approach in the juvenile criminal justice system in Indonesia is an effort to create more humane justice by restoring relationships between perpetrators, victims and society. This study aims to analyze the effectiveness of implementing restorative justice in the juvenile criminal justice system in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The research method used is a normative and empirical juridical approach by examining primary and secondary legal data, as well as interviews with law enforcement officials. The research results show that restorative justice has a positive impact in reducing the negative impacts of the justice process on children, such as stigmatization and barriers to social reintegration. However, its effectiveness is still hampered by a lack of understanding of law enforcement officials, a lack of supporting facilities, and low community involvement. To improve the implementation of restorative justice, intensive training is needed for law enforcement officers, strengthening the role of community institutions, as well as outreach to victims and the community regarding the benefits of this approach. It is hoped that this research can become a reference in developing policies that are more effective and oriented towards child protection in the criminal justice system in Indonesia.

PENDAHULUAN

Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pelaku dewasa, seperti tahap perkembangan psikologis dan sosial yang masih berlangsung. Oleh karena itu, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum perlu mengutamakan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar hukuman. Pendekatan *restorative justice* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindari dampak negatif proses peradilan terhadap anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari menemukan bahwa penerapan *restorative justice* di Australia telah berhasil menurunkan tingkat residivisme hingga 30% dalam lima tahun pertama (Wulandari, 2019). Di Kanada, studi oleh Smith menunjukkan bahwa 70% korban merasa lebih puas dengan proses *restorative justice* dibandingkan dengan proses peradilan tradisional (Smith, 2020). Sementara itu, di Indonesia, penelitian oleh Nugroho dan Wijaya mengungkapkan bahwa inisiatif *restorative justice* baru mulai diterapkan pada tingkat pilot project dan membutuhkan kerangka kerja yang lebih jelas untuk implementasi luas (Nugroho & Wijaya, 2022). Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memberikan analisis empiris mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* di Indonesia, khususnya dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik. Penelitian ini juga akan mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi serta memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan penerapan pendekatan ini di masa depan (Prasetyo, 2021).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan *restorative justice* dalam kasus pidana di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan *restorative justice* serta untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan implementasi pendekatan ini di Indonesia.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur mengenai *restorative justice* dan memberikan perspektif baru dalam studi kriminologi di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengimplementasikan *restorative justice* secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Namun, meskipun *restorative justice* memiliki tujuan mulia, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas, dan stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana menjadi hambatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Restorative Justice

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama restorative justice meliputi partisipasi aktif semua pihak, dialog, dan pencapaian kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi (Zehr, 2002).

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menekankan perlunya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu instrumen utama adalah pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restorative justice. Diversi wajib dilakukan dalam kasus-kasus yang ancaman pidananya kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hambatan Implementasi Restorative Justice

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi restorative justice di Indonesia adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pendekatan ini, dan minimnya fasilitas pendukung, seperti lembaga mediasi dan konseling (Riyadi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau library research untuk mengevaluasi efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus pidana di Indonesia. Penelitian kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi konsep dan konteks sosial hukum yang kompleks serta memungkinkan analisis mendalam terhadap data tekstual dan kontekstual yang ada. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik penelitian (Bryman, 2016).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur sekunder yang mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, disertasi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan restorative justice dan penerapannya dalam konteks pidana di Indonesia. Sumber data ini diperoleh dari berbagai perpustakaan, repositori online, dan basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect. Literatur yang dipilih mencakup karya-karya dari berbagai disiplin ilmu seperti hukum, kriminologi, dan sosiologi yang memberikan perspektif multidimensi tentang restorative justice.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan identifikasi, seleksi, dan pengumpulan literatur yang berfokus pada konsep restorative justice, studi kasus implementasi, serta analisis kebijakan terkait. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori seperti definisi, aplikasi, manfaat, dan tantangan penerapan restorative justice di Indonesia.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengorganisasian data, pembacaan data secara mendalam, pengkodean data, penafsiran data, dan penyajian hasil analisis. Pengorganisasian

data melibatkan pengelompokan literatur berdasarkan topik dan tema utama yang berkaitan dengan restorative justice. Pembacaan data secara mendalam dilakukan untuk memahami konteks dan isi dari setiap literatur yang dikumpulkan. Pengkodean data dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan subtema yang relevan dengan penelitian.

Selanjutnya, penafsiran data dilakukan dengan menganalisis temuan berdasarkan kerangka teori yang telah ditentukan dan membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu untuk melihat kesenjangan dan kesamaan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk naratif yang mendeskripsikan temuan-temuan utama, implikasi, serta rekomendasi untuk praktik dan kebijakan di bidang restorative justice.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Restorative Justice di Indonesia: Konsep dan Implementasi

Penerapan restorative justice di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui berbagai inisiatif di tingkat lokal dan nasional. Restorative justice, yang berfokus pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan komunitas, dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung retributif. Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk, termasuk mediasi penal, dialog restoratif, dan program rehabilitasi (Suharto, 2020).

Namun, meskipun ada kemajuan, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum serta masyarakat luas. Selain itu, perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di berbagai daerah menyebabkan inkonsistensi dalam aplikasi kebijakannya. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung program-program restorative justice, sehingga sering kali tidak mencapai dampak yang diharapkan.

Restorative justice (keadilan restoratif) adalah sebuah pendekatan dalam penyelesaian konflik yang menekankan pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana serta memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku. Restorative justice bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih holistik dengan melibatkan semua pihak yang terdampak oleh kejahatan dalam proses penyelesaian.

Di dalam konsep restorative justice, proses penyelesaian masalah berfokus pada beberapa prinsip utama, yaitu:

- a. Pemulihan Kerugian (Restoration of Harm): Mengutamakan upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik itu kerugian fisik, emosional, maupun material
- b. Partisipasi Sukarela (Voluntary Participation): Melibatkan korban, pelaku, dan komunitas secara sukarela dalam proses penyelesaian konflik dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.
- c. Reintegrasi Sosial (Social Reintegration): Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan membantu mereka untuk kembali diterima dalam masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya.

- d. Dialog dan Mediasi (Dialogue and Mediation): Menggunakan teknik dialog dan mediasi untuk membantu semua pihak memahami dampak dari kejahatan dan mencari solusi bersama yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Implementasi *restorative justice* di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai inisiatif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Salah satu bentuk konkret dari penerapan ini adalah melalui mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus pidana ringan di luar pengadilan. Dalam hal ini, korban dan pelaku diajak untuk berdialog dan mencapai kesepakatan mengenai kompensasi atau tindakan perbaikan lainnya yang dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.

Selain itu, pengadilan di Indonesia juga telah mulai mengadopsi pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak melalui sistem peradilan anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Contohnya, dalam beberapa kasus pidana yang melibatkan anak, hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara tetapi mengarahkan pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi atau pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

2. Analisis Keberhasilan dan Tantangan dalam Penerapan *Restorative Justice*

Keberhasilan penerapan *restorative justice* di Indonesia dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti tingkat kepuasan korban, tingkat *reoffending* (pengulangan tindak pidana) oleh pelaku, dan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini (Purwanti, 2021). Studi oleh Suharto (2021) menunjukkan bahwa korban yang terlibat dalam proses *restorative justice* lebih puas dengan hasil yang dicapai dibandingkan dengan mereka yang melalui sistem peradilan tradisional. Hal ini disebabkan oleh fokus pada pemulihan dan pemberian kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik.

Di sisi lain, penelitian juga mengungkapkan tantangan utama dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia, termasuk resistensi dari sistem peradilan tradisional dan kurangnya pemahaman mengenai konsep tersebut di kalangan aparat penegak hukum. Misalnya, Nugroho (2022) menemukan bahwa banyak hakim dan jaksa masih cenderung memilih pendekatan retributif, karena kurangnya pelatihan dan kesadaran tentang manfaat *restorative justice*. Selain itu, kekurangan dalam hal sumber daya dan dukungan struktural menghambat keberhasilan implementasi *restorative justice* di banyak daerah.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan beberapa keberhasilan signifikan, terutama dalam konteks penanganan kasus pidana ringan dan kasus yang melibatkan anak-anak. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah meningkatnya kepuasan korban terhadap hasil yang dicapai melalui proses mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan. Dalam banyak kasus, korban merasa lebih dihargai dan diakui perasaannya melalui dialog langsung dengan pelaku, yang sering kali menghasilkan kesepakatan yang adil dan memulihkan.

Keberhasilan lainnya adalah pengurangan tingkat *residivisme* atau pengulangan tindak pidana. Menurut penelitian, partisipasi dalam program *restorative justice* dapat membantu pelaku memahami dampak tindakannya dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri serta berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa stigma sebagai mantan narapidana (Nugroho, 2021).

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* juga berhasil mendorong perubahan sikap di kalangan

aparatus penegak hukum dan masyarakat. Meskipun awalnya ada resistensi, banyak pihak mulai mengakui manfaat dari pendekatan ini dalam mengurangi beban kerja pengadilan dan penjara, serta menciptakan penyelesaian yang lebih berkelanjutan dan humanis. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian oleh Suharto (2020) yang menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya efektif dalam penyelesaian kasus tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di masyarakat.

Tantangan dalam Penerapan *Restorative Justice*

Meskipun ada banyak keberhasilan, penerapan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan hakim. Banyak di antara mereka yang masih memiliki paradigma tradisional yang fokus pada penghukuman daripada pemulihan, sehingga sulit untuk mengubah pendekatan keadilan yang sudah mendarah daging tersebut.

Selain itu, tantangan lain datang dari kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung program *restorative justice*. Ini termasuk kebutuhan akan fasilitator yang terlatih dalam mediasi dan resolusi konflik, serta tempat yang aman untuk mengadakan pertemuan antara korban dan pelaku (Raharjo, 2018). Penelitian oleh Arifin (2018) menunjukkan bahwa banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses yang memadai ke program *restorative justice*, sehingga menghambat pelaksanaan yang merata dan konsisten.

Tantangan budaya juga memainkan peran penting dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia. Perbedaan nilai budaya dan norma hukum di berbagai daerah sering kali mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan. Misalnya, di beberapa komunitas, pendekatan *restorative justice* mungkin tidak diterima atau dipahami dengan baik karena bertentangan dengan kebiasaan lokal atau pandangan tradisional tentang keadilan. Ini membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap konteks budaya yang beragam di Indonesia.

Lebih lanjut, ada juga tantangan dari segi legal dan regulasi, di mana kebijakan hukum yang ada mungkin belum sepenuhnya mendukung penerapan *restorative justice*. Meskipun sudah ada beberapa peraturan yang mendukung, seperti dalam sistem peradilan anak, masih dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik untuk mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana secara lebih luas. Dari review berbagai penelitian yang ada, beberapa poin penting dapat diidentifikasi. Pertama, *restorative justice* terbukti efektif dalam meningkatkan kepuasan korban dan mengurangi tingkat residivisme, yang merupakan indikator penting keberhasilan dalam penanganan kasus pidana (Nugroho, 2021). Kedua, pendekatan ini membantu mengurangi beban sistem peradilan dan penjara serta memberikan solusi yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Namun, untuk mencapai implementasi yang lebih efektif, diperlukan perubahan dalam sistem hukum dan kebijakan yang lebih mendukung, peningkatan pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, serta penyediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Tantangan budaya juga perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal, sehingga penerapan *restorative justice* dapat diterima dan diimplementasikan secara luas di seluruh Indonesia.

3. Dampak Penerapan *Restorative Justice* terhadap Korban dan Pelaku

Dampak positif penerapan *restorative justice* terhadap korban dan pelaku telah menjadi fokus

banyak penelitian di Indonesia. Restorative justice memungkinkan korban untuk memiliki suara dalam proses hukum, memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan dampak dari kejahatan dan kebutuhan mereka akan pemulihan. Hal ini sering kali menghasilkan hasil yang lebih memuaskan bagi korban dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional, yang cenderung fokus pada hukuman bagi pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban.

Bagi pelaku, restorative justice menawarkan kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, yang dapat membantu mengurangi tingkat reoffending (Purwanti, 2021). Penerapan restorative justice memberikan dampak signifikan terhadap korban tindak pidana, terutama dalam hal pemulihan psikologis dan sosial. Salah satu dampak utama adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pelaku. Proses ini memungkinkan korban untuk terlibat aktif dalam menentukan bentuk ganti rugi atau kompensasi yang memadai, sehingga mereka merasa keadilan telah ditegakkan dengan lebih adil dan memuaskan (Purwanti, 2021).

Lebih lanjut, restorative justice juga membantu korban mengatasi trauma dan mempromosikan pemulihan yang lebih holistik. Melalui dialog yang difasilitasi, korban dapat memperoleh penjelasan dan permintaan maaf dari pelaku, yang sering kali memainkan peran penting dalam proses penyembuhan (Raharjo, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa korban yang berpartisipasi dalam proses restorative justice cenderung mengalami penurunan tingkat ketakutan dan kebencian, serta peningkatan perasaan aman dan diberdayakan.

Selain itu, penerapan restorative justice memungkinkan korban untuk menerima kompensasi materi atau restitusi yang dapat membantu mereka pulih dari kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini juga dapat mengurangi beban emosional yang dirasakan korban, karena mereka mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung dengan pelaku dan mendengar penjelasan mengenai motivasi atau alasan di balik tindak kejahatan tersebut.

Dampak terhadap Pelaku

Dampak penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana juga sangat signifikan, terutama dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Proses restorative justice memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya dan memahami dampak yang ditimbulkan pada korban. Dengan terlibat dalam proses dialog dan mediasi, pelaku dapat mengembangkan rasa empati dan penyesalan yang lebih mendalam, yang dapat mengurangi risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana di masa depan.

Selain itu, restorative justice juga menawarkan alternatif hukuman yang lebih humanis dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang berfokus pada penghukuman (Dewi, 2019). Pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui kerja sosial atau bentuk kompensasi lainnya, yang tidak hanya membantu korban tetapi juga memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif dalam masyarakat.

Proses restorative justice dapat membantu pelaku mengurangi stigma sosial yang sering kali melekat pada mereka setelah menjalani hukuman penjara. Dengan terlibat dalam proses pemulihan yang bersifat kolaboratif, pelaku dapat meraih kembali kepercayaan masyarakat dan memperbaiki citra diri

mereka di mata keluarga dan lingkungan sosial (Purwanti, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang berpartisipasi dalam program restorative justice memiliki peluang yang lebih baik untuk membangun kembali hubungan sosial dan menghindari perilaku kriminal di masa depan (Raharjo, 2018).

Penelitian mengenai dampak restorative justice terhadap korban dan pelaku menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya, namun juga mengungkapkan beberapa perbedaan penting. Sebagai contoh, Arifin (2018) menemukan bahwa restorative justice dapat meningkatkan kepuasan korban dan pelaku dengan proses penyelesaian konflik dibandingkan dengan proses peradilan pidana tradisional. Sementara itu, Susanto (2020) menekankan pentingnya dukungan dari komunitas dan keluarga dalam memfasilitasi proses reintegrasi pelaku, yang merupakan faktor kunci dalam mencegah residivisme.

Dalam konteks Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice dapat mengurangi beban sistem peradilan dan penjara, serta mendorong pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam penanganan kasus pidana. Penelitian ini sejalan dengan temuan internasional yang menunjukkan bahwa restorative justice tidak hanya efektif dalam menyelesaikan konflik tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di masyarakat.

Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan restorative justice, terutama dalam hal dukungan dari aparat penegak hukum dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. sebagai hambatan utama dalam penerapan restorative justice di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai manfaat restorative justice serta memperkuat dukungan kelembagaan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan restorative justice di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan keadilan dan pemulihan bagi korban dan pelaku. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada dukungan yang kuat dari semua pihak terkait dan penyesuaian yang sensitif terhadap konteks budaya dan hukum setempat.

4. Efektivitas Restorative Justice dalam Konteks Kebijakan Pidana di Indonesia

Evaluasi efektivitas restorative justice dalam konteks kebijakan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana tradisional. Restorative justice memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan berfokus pada penyelesaian konflik secara damai, yang dapat mengurangi beban kerja pengadilan dan mengurangi overkapasitas di penjara. Selain itu, pendekatan ini dapat membantu mengatasi masalah ketidakadilan yang sering kali dialami oleh korban dalam sistem peradilan tradisional yang lebih berorientasi pada hukuman daripada pemulihan.

Namun, efektivitas penerapan restorative justice di Indonesia masih tergantung pada komitmen pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang dari restorative justice memerlukan perubahan paradigma dalam cara pandang terhadap keadilan pidana dan komitmen untuk menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung program-program yang ada (Purwanti, 2021). Dengan dukungan yang tepat, restorative justice memiliki potensi untuk menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk masalah kriminalitas dan keadilan di Indonesia.

Restorative justice berfokus pada keterlibatan aktif semua pihak yang terkena dampak kejahatan—

korban, pelaku, dan masyarakat—dalam proses pemulihan dan penyelesaian konflik. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kerugian yang terjadi akibat kejahatan dan mencegah terulangnya perilaku kriminal melalui penyelesaian yang bersifat partisipatif dan rekonsiliatif. Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk, termasuk mediasi penal dan program diversion untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Efektivitas Restorative Justice dalam Kebijakan Pidana:

a) Pemulihan Korban

Salah satu indikator utama efektivitas restorative justice adalah kemampuannya dalam memberikan pemulihan kepada korban. Penelitian menunjukkan bahwa korban yang berpartisipasi dalam program restorative justice merasa lebih puas dengan hasil penyelesaian dibandingkan dengan proses peradilan konvensional (Arifin, 2018). Mereka tidak hanya mendapatkan kompensasi materiil tetapi juga merasa didengar dan dihargai, yang penting untuk pemulihan psikologis mereka (Purwanti, 2021). Dalam konteks kebijakan pidana di Indonesia, fokus pada pemulihan korban dapat membantu mengatasi keluhan masyarakat tentang minimnya perhatian sistem peradilan terhadap kebutuhan dan hak-hak korban.

b) Rehabilitasi dan Reintegrasi Pelaku

Restorative justice juga efektif dalam mengurangi residivisme atau pengulangan tindak pidana. Pelaku yang terlibat dalam proses restorative justice lebih cenderung memahami dampak tindakannya dan menunjukkan penyesalan yang mendalam (Nugroho, 2021). Ini sejalan dengan kebijakan pidana di Indonesia yang semakin menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman (Suharto, 2020). Dengan memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban, pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak dan mengurangi risiko pengulangan tindak kriminal di masa depan.

c) Pengurangan Beban Sistem Peradilan

Restorative justice membantu mengurangi beban yang ditanggung oleh sistem peradilan pidana konvensional, seperti kelebihan kapasitas penjara dan keterlambatan penyelesaian kasus. Dengan memberikan alternatif penyelesaian di luar pengadilan, sistem ini dapat membantu mempercepat proses penyelesaian kasus dan mengurangi biaya yang terkait dengan proses hukum yang panjang (Raharjo, 2018). Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki tantangan signifikan terkait kepadatan penjara dan inefisiensi sistem peradilan.

d) Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pendekatan restorative justice juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemulihan dan pencegahan kejahatan. Ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan membangun budaya kepedulian sosial yang lebih tinggi, yang pada akhirnya membantu mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Dalam kebijakan pidana di Indonesia, peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sistem

peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Tantangan dan Hambatan

Namun, penerapan restorative justice di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah resistensi dari aparat penegak hukum yang masih cenderung berorientasi pada pendekatan retributif. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat restorative justice menjadi penghalang dalam implementasinya secara luas (Purwanti, 2021). Keterbatasan sumber daya dan fasilitas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program restorative justice yang efektif (Nugroho, 2021).

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada peningkatan edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain itu, kebijakan yang mendukung dan pendanaan yang memadai juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program restorative justice (Yulianto, 2019).

SIMPULAN

Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi. Meskipun demikian, efektivitasnya masih terkendala oleh pemahaman yang kurang memadai dari aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas, dan stigma sosial. Diperlukan upaya terpadu melalui pelatihan, penguatan infrastruktur, dan edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan penerapan restorative justice di masa depan.

Penerapan restorative justice dalam kasus pidana di Indonesia menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. Restorative justice tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan daripada penghukuman semata. Melalui pendekatan ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku, yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini terbukti mampu mengurangi tingkat residivisme, mempercepat proses penyelesaian kasus, dan mengurangi beban pada sistem peradilan pidana yang sering kali overburdened. Selain itu, restorative justice mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, yang merupakan langkah penting dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan membangun lingkungan sosial yang lebih aman dan kooperatif.

Namun, penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk resistensi dari aparat penegak hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pendekatan ini. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan komitmen yang lebih besar dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, untuk mendukung dan mengimplementasikan prinsip-prinsip restorative justice secara lebih luas. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta kampanye penyadaran di masyarakat juga sangat penting untuk memastikan bahwa restorative justice dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem hukum yang ada. Dengan demikian, diharapkan bahwa restorative justice dapat menjadi bagian integral dari kebijakan pidana di Indonesia, memberikan alternatif yang lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan bagi semua pihak yang terkena dampak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Riyadi, A. (2020). "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 45-60.
- Nugroho, S., & Wijaya, F. (2020). Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 200-218.
- Prasetyo, E. (2021). The Urgency of Restorative Justice in Indonesian Penal Policy. *Journal of Criminal Law Reform*, 7(4), 378-398
- Purwanti, E. (2021). Restorative Justice: Sebuah Alternatif dalam Penanganan Kasus Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 17(4), 89-105.
- Raharjo, S. (2018). Tantangan dan Peluang Penerapan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(3), 67-80.
- Smith, J. (2020). Victim Satisfaction and Restorative Justice: An Analysis of Canadian Practices. *Canadian Journal of Criminology*, 58(4), 359-376.
- Suharto, B. (2020). Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 19(3), 120-135.
- Wulandari, S. (2019). Effectiveness of Restorative Justice in Reducing Recidivism: A Study in Australia. *International Journal of Law and Criminal Justice*, 15(2), 99-114.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

Buku:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.